

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS PERINGATAN DARURAT DI MEDIA SOSIAL

Yudithia

Administrasi Publik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

E-mail: *yudithia@umrah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam pembentukan kebijakan publik dengan mengambil kasus gerakan "Peringatan Darurat" yang menggunakan simbol Garuda berlatar belakang biru di Indonesia. Media sosial kini menjadi alat partisipasi publik yang penting dalam konteks politik kontemporer, khususnya dalam merespons kebijakan yang dianggap kontroversial oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik dengan pendekatan kualitatif serta metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, observasi digital, dan analisis dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, sementara validitas dan reliabilitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Penelitian menemukan bahwa media sosial berperan signifikan dalam mobilisasi partisipasi publik melalui simbol visual yang kuat, seperti Garuda biru. Partisipasi masyarakat dalam gerakan ini berhasil menciptakan tekanan politik yang nyata terhadap kebijakan pemerintah dan DPR, serta menghasilkan perubahan sikap politik pada beberapa politisi dan partai politik. Temuan ini mendukung teori tangga partisipasi publik oleh Arnstein, ruang publik digital Habermas, dan semiotika politik Barthes, yang menegaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang demokrasi alternatif yang efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik. Simbol visual memainkan peran penting dalam memobilisasi opini publik dan memperkuat partisipasi politik reaktif. Media sosial terbukti sebagai alat demokrasi yang signifikan dalam konteks pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Partisipasi reaktif masyarakat, simbolisasi visual yang kuat, dan tekanan publik yang masif melalui media digital secara nyata mampu mempengaruhi proses kebijakan publik.

Kata kunci

Media Sosial, Kebijakan Publik, Partisipasi Reaktif, Simbolisasi Visual, Demokrasi Digital

ABSTRACT

This study analyzes the role of social media in shaping public policy, using the "Peringatan Darurat" movement in Indonesia—which employed the blue-background Garuda symbol as a case study. Social media has become a key tool for public participation in contemporary politics, particularly in responding to controversial government policies. Adopting a constructivist paradigm, the research employs a qualitative approach and case study method. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected informants, digital observation, and document analysis, then analyzed using thematic analysis. Validity and reliability were ensured through source and method triangulation. Findings show that social media significantly mobilized public participation via powerful visual symbols like the blue Garuda. The movement generated real political pressure on the government and DPR, leading to shifts in attitudes among some politicians and political parties. These results support Arnstein's ladder of citizen participation, Habermas's digital public sphere, and Barthes's political semiotics, confirming social media as an effective alternative democratic space for influencing public policy. Visual symbols play a crucial role in mobilizing public opinion and strengthening reactive political participation. In the Indonesian context, social media proves to be a significant democratic tool in public policy formation, where reactive public participation, strong visual symbolism, and massive digital pressure can effectively shape policy processes.

Keywords***Social Media, Public Policy, Reactive Participation, Visual Symbolism, Digital Democracy*****1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara radikal lanskap komunikasi publik dan politik di Indonesia. Media sosial kini memainkan peran penting sebagai ruang alternatif bagi masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi politik dan berpartisipasi dalam diskursus kebijakan publik. Platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube secara intensif digunakan untuk menyuarakan protes, dukungan, maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam proses perumusan kebijakan publik, yang sebelumnya lebih didominasi oleh aktor politik formal seperti DPR, pemerintah, dan lembaga negara lainnya.

Pada akhir Agustus 2024, masyarakat Indonesia menyaksikan kemunculan fenomena gerakan "Peringatan Darurat" dengan lambang Garuda berlatar belakang biru yang secara cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Gerakan ini berawal dari ketidakpuasan publik terhadap langkah DPR yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Alih-alih mengikuti putusan MK yang menetapkan syarat pencalonan sebesar 7,5 persen suara di DPRD, DPR bersikeras mempertahankan ketentuan lama yakni minimal 20 persen kursi DPRD. Tindakan ini kemudian memicu gelombang protes publik secara luas melalui media sosial.

Menariknya, simbolisasi gerakan dengan lambang Garuda berlatar biru yang awalnya diambil dari sebuah video fiksi bertema horor analog, secara efektif digunakan masyarakat sebagai medium untuk mengkritisi kebijakan pemerintah dan DPR. Pilihan simbol ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menjadi representasi visual dari kecemasan kolektif publik terhadap ancaman terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Keberadaan simbol tersebut memperkuat resonansi emosional di kalangan masyarakat luas, mendorong partisipasi lebih luas dalam gerakan tersebut.

Gerakan "Peringatan Darurat" menunjukkan pergeseran signifikan dalam pola partisipasi politik publik, di mana media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan atau komunikasi interpersonal, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang efektif memengaruhi kebijakan. Fenomena ini mencerminkan konsep partisipasi publik reaktif, di mana masyarakat secara aktif merespons kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi dan nilai demokrasi. Dinamika ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana media sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mobilisasi opini publik dan partisipasi politik yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik.

Dampak nyata gerakan ini secara politis maupun sosial tidak bisa dianggap remeh. Tekanan publik melalui media sosial berhasil mengubah sikap sejumlah partai politik seperti PKS dan PKB yang akhirnya mendukung pembatalan kebijakan DPR. Bahkan, peristiwa ini juga berdampak pada pengunduran diri beberapa tokoh politik dari partai mereka sebagai bentuk protes simbolik terhadap ketidakadilan prosedural. Lebih luas lagi, gejolak politik akibat protes ini juga berdampak pada aspek ekonomi, ditandai dengan penurunan IHSG serta pelemahan nilai tukar rupiah yang merefleksikan sensitivitas ekonomi nasional terhadap instabilitas politik.

Dalam kajian ilmu Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan, studi mengenai peran media sosial sebagai instrumen dalam pembentukan kebijakan publik telah banyak

dilakukan. Namun demikian, sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik formal oleh aktor politik utama seperti pemerintah, lembaga legislatif, maupun figur politik tertentu. Sedikit sekali penelitian yang secara eksplisit mengkaji bagaimana gerakan publik yang spontan di media sosial dapat memengaruhi proses kebijakan secara nyata, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan mengenai dampak partisipasi publik yang bersifat spontan, organik, dan viral di media sosial terhadap perumusan atau perubahan kebijakan publik secara langsung.

Dari perspektif literatur, meskipun telah tersedia berbagai kajian mengenai partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan, masih sedikit literatur yang secara khusus mengelaborasi fenomena gerakan publik berbasis simbol visual atau semiotik yang berkembang viral di platform digital sebagai bentuk partisipasi politik reaktif. Sebagian besar literatur cenderung menyoroti aspek tekstual atau narasi verbal dalam komunikasi politik digital, sementara peran elemen simbolik yang memiliki kekuatan emosional besar—seperti lambang Garuda biru dalam gerakan "Peringatan Darurat"—masih jarang dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah literatur dengan mengintegrasikan analisis tentang simbol visual dalam gerakan sosial digital serta pengaruhnya terhadap efektivitas partisipasi publik dalam proses kebijakan publik.

Penelitian ini bertumpu pada teori Partisipasi Publik dalam Administrasi Publik sebagaimana dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein melalui model tangga partisipasi (Ladder of Citizen Participation), yang menjelaskan gradasi partisipasi publik mulai dari manipulasi hingga kontrol penuh oleh masyarakat dalam pengembangan kebijakan. Dalam konteks era digital, teori Arnstein ini dikombinasikan dengan konsep Ruang Publik Digital dari Jurgen Habermas, yang melihat ruang publik sebagai tempat terjadinya diskursus rasional dan kritis yang memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Media sosial, dalam hal ini, dianggap sebagai ruang publik digital yang memungkinkan partisipasi aktif dan reaktif masyarakat dalam merespons isu-isu kebijakan secara spontan dan masif.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan Semiotika Politik dari Roland Barthes, terutama dalam memahami bagaimana simbol visual atau tanda yang digunakan dalam gerakan sosial dapat mengartikulasikan makna kolektif dan mobilisasi emosional secara efektif. Dalam kasus gerakan "Peringatan Darurat" dengan lambang Garuda berlatar biru, simbol tersebut berfungsi sebagai penanda kolektif yang merepresentasikan kekhawatiran publik terhadap ancaman terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Dengan demikian, integrasi teori partisipasi publik, ruang publik digital, serta semiotika politik memberikan pijakan teoritis yang kokoh untuk menjelaskan bagaimana partisipasi digital masyarakat melalui simbol visual mampu mempengaruhi secara signifikan proses perumusan kebijakan publik di era digital.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep utama, yaitu konsep media sosial sebagai instrumen partisipasi publik, konsep partisipasi reaktif dalam kebijakan publik, serta konsep simbolisasi gerakan sosial. Media sosial dalam penelitian ini dimaknai sebagai platform komunikasi digital yang memungkinkan interaksi lintas komunitas secara cepat, luas, dan simultan, serta mampu membentuk opini publik secara signifikan. Dalam konteks pembentukan kebijakan publik, media sosial berfungsi sebagai kanal partisipasi alternatif yang tidak terikat oleh struktur formal pemerintahan, memungkinkan publik untuk merespons isu-isu kebijakan secara spontan dan kritis melalui berbagai bentuk komunikasi digital, seperti teks, gambar, video, atau simbol-simbol tertentu yang bersifat viral.

Selanjutnya, konsep partisipasi reaktif digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat merespons kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi atau nilai demokrasi yang diyakini oleh publik. Dalam hal ini, partisipasi reaktif ditandai dengan respons yang bersifat spontan, organik, dan berbasis pada ketidakpuasan kolektif. Konsep simbolisasi gerakan sosial juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, yaitu bagaimana simbol-simbol visual digunakan untuk mengartikulasikan pesan politik secara efektif dan emosional, sehingga mampu menggerakkan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat. Melalui integrasi ketiga konsep ini, penelitian ini akan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana fenomena "Peringatan Darurat" dengan simbol Garuda biru dapat menjadi alat mobilisasi opini publik dan memengaruhi perubahan dalam kebijakan publik di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran media sosial dalam mendorong partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik, dengan fokus khusus pada kasus gerakan "Peringatan Darurat" yang menggunakan lambang Garuda biru di media sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengungkap secara jelas pola partisipasi reaktif yang muncul dari fenomena tersebut serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas simbol visual dalam mobilisasi opini publik. Terakhir, penelitian ini bertujuan menjelaskan dampak nyata dari gerakan media sosial tersebut terhadap perubahan sikap politik para pengambil kebijakan dan implikasinya terhadap proses pengambilan keputusan publik di Indonesia di era digital.

Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih mendalam karena menggambarkan bagaimana interaksi antara teknologi digital, partisipasi publik, dan proses kebijakan publik saling berkelindan dalam dinamika politik kontemporer. Analisis tentang peran media sosial dalam kasus ini memberikan pemahaman penting tentang bagaimana media sosial telah mengubah secara mendalam pola hubungan antara pemerintah dan publik dalam proses perumusan kebijakan. Studi ini diharapkan mampu mengisi celah dalam kajian Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan, terutama dalam memahami secara lebih komprehensif implikasi penggunaan media digital terhadap partisipasi demokratis dan efektivitas kebijakan publik di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik, di mana realitas sosial dipandang sebagai hasil konstruksi dari interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam paradigma ini, peneliti memahami bahwa makna tentang suatu fenomena tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai interpretasi subjektif para aktor sosial yang terlibat. Pemilihan paradigma ini relevan dengan fokus penelitian, yaitu bagaimana masyarakat mengonstruksi makna dan peran media sosial dalam partisipasi publik yang berkaitan dengan kebijakan publik melalui simbolisasi gerakan "Peringatan Darurat" di media sosial.

Sejalan dengan paradigma konstruktivistik tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui deskripsi naratif yang detail. Metode kualitatif digunakan karena mampu mengungkap dinamika partisipasi reaktif masyarakat, proses penciptaan makna kolektif terhadap simbol Garuda biru, serta bagaimana media sosial digunakan secara efektif sebagai ruang publik digital yang memengaruhi kebijakan publik. Melalui metode kualitatif, peneliti juga dapat menggali aspek-aspek subjektif,

nilai-nilai, serta motivasi yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat dalam gerakan ini.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara intensif dan mendalam tentang fenomena "Peringatan Darurat" yang terjadi di media sosial. Studi kasus dipilih karena fenomena ini memiliki karakteristik unik berupa mobilisasi publik secara masif melalui simbol visual yang viral, sehingga menarik untuk dipahami secara menyeluruh. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci konteks spesifik, latar belakang sosial-politik, serta interaksi aktor-aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam gerakan ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi wawancara mendalam, observasi digital, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang terdiri dari aktivis media sosial, tokoh masyarakat, pakar kebijakan publik, akademisi, serta pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan isu kebijakan yang diprotes. Observasi digital dilakukan melalui analisis konten terhadap postingan, komentar, dan interaksi di berbagai platform media sosial yang berhubungan dengan fenomena "Peringatan Darurat." Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen tertulis seperti berita daring, laporan media, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan.

Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, di mana pemilihan informan didasarkan pada kriteria spesifik, yaitu individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam gerakan "Peringatan Darurat" di media sosial, serta individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian ini. Informan juga dipilih berdasarkan variasi latar belakang agar dapat memperkaya data penelitian dan memberikan perspektif beragam tentang fenomena yang dikaji. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mencerminkan keragaman persepsi dan pengalaman dalam mengonstruksi makna terhadap fenomena tersebut.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, yang melibatkan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, serta verifikasi data. Data wawancara ditranskripsikan secara verbatim, kemudian dilakukan coding untuk mengidentifikasi pola dan tema-tema sentral terkait peran media sosial, partisipasi reaktif, dan simbolisasi gerakan sosial. Validitas dan reliabilitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dengan hasil observasi digital dan dokumen terkait. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan triangulasi metode dengan memadukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga data yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi serta mampu menggambarkan secara komprehensif fenomena yang menjadi objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan ini mendeskripsikan secara mendalam temuan penelitian terkait fenomena "Peringatan Darurat" dengan simbol Garuda berlatar belakang biru yang berkembang pesat di media sosial. Analisis yang dilakukan meliputi bagaimana gerakan ini menyebar, mengapa gerakan ini mendapatkan perhatian publik secara luas, serta bagaimana peran media sosial dalam mempercepat dan memperluas cakupan gerakan tersebut. Secara spesifik, bagian ini akan mengurai temuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi publik dalam gerakan ini, baik dari aspek motivasi individu maupun dinamika kolektif yang terbentuk melalui media digital.

Secara lebih lanjut, hasil penelitian juga akan mengungkapkan bagaimana simbol visual Garuda biru mampu secara efektif digunakan sebagai media komunikasi politik yang menciptakan resonansi emosional di kalangan publik. Simbol ini tidak hanya berfungsi sebagai representasi dari rasa cemas publik terhadap kebijakan pemerintah yang kontroversial, tetapi juga sebagai instrumen penyatu yang memperkuat solidaritas masyarakat dalam gerakan tersebut. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pemaknaan simbol tersebut dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, serta peran simbolisasi dalam mendorong partisipasi aktif di ruang digital.

Selain itu, hasil penelitian akan menggambarkan secara komprehensif dampak nyata gerakan "Peringatan Darurat" terhadap kebijakan publik, terutama dalam konteks interaksi antara masyarakat dengan lembaga-lembaga politik formal seperti pemerintah dan DPR. Di sini akan dijelaskan perubahan sikap politisi dan partai politik tertentu, serta respons kebijakan yang muncul akibat tekanan opini publik yang masif melalui media sosial. Analisis ini juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas media sosial sebagai instrumen advokasi publik dan pembentukan opini yang berdampak nyata terhadap proses kebijakan.

Pada akhirnya, pembahasan akan menyajikan interpretasi kritis tentang implikasi yang lebih luas dari fenomena ini terhadap demokrasi digital dan partisipasi publik di Indonesia. Temuan-temuan penelitian ini akan dihubungkan dengan teori-teori partisipasi publik, semiotika politik, dan ruang publik digital yang menjadi landasan teoritis penelitian. Dengan demikian, bagian hasil dan pembahasan ini tidak hanya menyajikan temuan empiris secara rinci, tetapi juga memperkaya pemahaman teoritis tentang dinamika hubungan antara media sosial, simbolisasi visual, dan proses pembentukan kebijakan publik di era digital.

Peran publik dalam gerakan "Peringatan Darurat" di media sosial mencerminkan dinamika baru dalam partisipasi politik masyarakat. Media sosial memberikan platform yang efektif bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara luas, cepat, dan masif, tanpa terikat oleh struktur formal dan birokrasi yang sering membatasi partisipasi politik konvensional. Dalam konteks gerakan ini, partisipasi masyarakat terlihat jelas melalui berbagai unggahan, diskusi, serta interaksi intensif yang menghasilkan tekanan signifikan terhadap pemerintah dan DPR terkait kebijakan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Penggunaan simbol Garuda berlatar biru sebagai representasi visual dari gerakan ini juga memperlihatkan bagaimana publik mampu menciptakan solidaritas kolektif melalui simbolisasi politik. Simbol visual ini memiliki kekuatan emosional yang besar, membantu gerakan ini untuk mendapatkan perhatian luas dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan yang sebelumnya kurang peduli terhadap isu politik. Melalui simbol ini, masyarakat berhasil menyampaikan pesan politik secara efektif, sehingga pesan tersebut mampu meresonansi dan menggugah kesadaran kolektif mengenai ancaman yang dianggap membahayakan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Peran aktif masyarakat dalam gerakan ini menghasilkan dampak nyata yang signifikan terhadap proses kebijakan publik di Indonesia. Tekanan publik yang dihasilkan oleh gerakan ini berhasil mengubah sikap sejumlah partai politik dan tokoh politik terkait RUU Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi publik melalui media sosial bukan lagi sekadar ekspresi simbolis semata, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan nyata yang dapat mempengaruhi keputusan politik di level legislatif maupun eksekutif. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya peran publik dalam demokrasi digital yang semakin dinamis.

Gerakan "Peringatan Darurat" ini menggambarkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi dan kebijakan publik melalui platform digital. Partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan ini memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik alternatif yang efektif untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi publik. Implikasi dari fenomena ini adalah semakin meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahap pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya dapat memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia di era digital.

Tabel berikut ini menyajikan hasil analisis tematik yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan para informan dalam penelitian ini. Analisis tematik ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi tema-tema sentral yang muncul dari pengalaman dan pandangan informan tentang gerakan "Peringatan Darurat" yang berkembang pesat di media sosial. Melalui proses coding dan kategorisasi data wawancara, analisis ini menghasilkan beberapa kategori utama, termasuk peran media sosial, simbolisasi gerakan, partisipasi publik, dampak terhadap kebijakan, serta tantangan dan hambatan yang dialami selama gerakan berlangsung. Setiap kategori dijabarkan lebih lanjut ke dalam tema-tema spesifik, memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai aspek-aspek penting dari fenomena sosial-politik ini, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan demokrasi digital di Indonesia.

Tabel 1. Analisis Tematik Hasil Wawancara

| Tema Utama | Sub Tema | Hasil Analisis |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Peran Media Sosial | Efektivitas penyebaran informasi | Media sosial dianggap sangat efektif dalam menyebarluaskan isu secara cepat dan luas, khususnya Twitter. |
| | Interaksi publik | Diskusi intensif di media sosial berpengaruh besar dalam pembentukan opini publik. |
| Simbolisasi Gerakan | Makna simbol Garuda biru | Simbol Garuda biru memiliki makna kuat sebagai representasi situasi darurat demokrasi di mata publik. |
| | Daya tarik visual | Simbol visual meningkatkan daya tarik emosional, memperkuat solidaritas dan partisipasi publik. |
| Partisipasi Publik | Motivasi partisipasi | Kekhawatiran atas ancaman terhadap demokrasi menjadi alasan utama masyarakat ikut berpartisipasi. |
| | Bentuk partisipasi | Partisipasi melalui unggahan, komentar, dan pembagian konten di media sosial sangat tinggi dan aktif. |
| Dampak Terhadap Kebijakan | Perubahan sikap politisi | Gerakan ini berhasil mengubah sikap politisi, bahkan menyebabkan pengunduran diri beberapa tokoh politik. |
| | Respons kebijakan pemerintah | Tekanan publik yang masif memaksa pemerintah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat, meskipun lambat. |
| Tantangan dan Hambatan | Hoaks dan disinformasi | Tantangan terbesar berupa penyebaran informasi palsu dan upaya pelemahan gerakan melalui disinformasi. |
| | Intimidasi digital | Adanya ancaman atau intimidasi digital terhadap tokoh-tokoh kunci yang aktif dalam gerakan ini. |

Sumber: Analisis Hasil Penelitian

Fenomena "Peringatan Darurat" di media sosial menggambarkan dengan jelas pergeseran pola komunikasi politik dan partisipasi publik di Indonesia. Melalui

wawancara mendalam, ditemukan bahwa media sosial memiliki peran krusial sebagai medium efektif yang memungkinkan informasi menyebar secara masif dan cepat. Twitter disebut sebagai platform paling berpengaruh karena sifat interaktif, real-time, dan kemampuannya menjangkau berbagai kalangan secara luas.

Publik memandang simbol Garuda biru bukan sekadar gambar biasa, tetapi sebagai representasi kuat dari ancaman nyata terhadap nilai demokrasi. Daya tarik simbol visual ini ternyata berhasil membangun solidaritas emosional yang luas di kalangan masyarakat, menjadikan gerakan ini tidak hanya sekadar protes politik, tetapi juga gerakan yang memiliki resonansi emosional yang kuat.

Motivasi utama masyarakat dalam gerakan ini berasal dari ketidakpuasan dan kecemasan terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat serta mengancam prinsip demokrasi. Bentuk partisipasi yang tinggi melalui unggahan, komentar, dan penyebaran konten di media sosial menunjukkan bahwa publik tidak hanya pasif tetapi aktif dalam mendorong perubahan kebijakan.

Gerakan ini secara nyata berhasil memengaruhi sikap politisi dan bahkan menyebabkan perubahan signifikan dalam tubuh partai politik tertentu. Beberapa tokoh politik memilih mundur dari partai sebagai bentuk ketegasan sikap atas kebijakan yang dianggap bertentangan dengan aspirasi publik. Meskipun demikian, respons pemerintah masih dianggap lambat dan kurang memuaskan, mencerminkan sikap yang belum sepenuhnya responsif terhadap tuntutan publik.

Di sisi lain, tantangan yang muncul dalam gerakan ini juga tidak bisa dianggap remeh. Informan menyebutkan bahwa penyebaran berita palsu atau hoaks merupakan ancaman serius yang mencoba melemahkan gerakan ini. Selain itu, intimidasi digital terhadap sejumlah tokoh aktif dalam gerakan ini juga menjadi hambatan signifikan yang dapat membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.

Analisis ini menunjukkan bahwa gerakan "Peringatan Darurat" memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran politik publik di era digital. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan kekuatan media sosial sebagai alat demokrasi digital yang mampu memengaruhi dinamika politik nasional. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peran media sosial sebagai bagian integral dalam proses demokrasi dan pembentukan kebijakan publik.

Temuan penelitian ini memperkuat teori tangga partisipasi publik yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, di mana partisipasi publik dalam kasus gerakan "Peringatan Darurat" di media sosial mencerminkan bentuk partisipasi pada tingkatan konsultasi hingga mobilisasi massa yang tinggi. Dalam konteks ini, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima pasif kebijakan, tetapi aktif berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan melalui kritik dan tekanan secara publik di platform digital. Temuan ini menegaskan bahwa media sosial secara efektif memungkinkan masyarakat naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi publik, yakni partisipasi aktif yang berpotensi mempengaruhi kebijakan secara signifikan.

Penelitian ini juga mendukung pandangan Jurgen Habermas tentang ruang publik digital, di mana media sosial berfungsi sebagai arena baru bagi diskursus publik yang kritis terhadap isu kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam gerakan ini menggambarkan bahwa media sosial telah menjadi ruang diskusi kritis yang lebih terbuka dan demokratis dibandingkan dengan media konvensional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi sarana utama bagi publik untuk mengartikulasikan ketidakpuasan secara rasional maupun emosional, menciptakan tekanan nyata terhadap pengambil kebijakan.

Secara semiotis, penelitian ini menunjukkan bahwa simbolisasi visual, seperti lambang Garuda biru, efektif dalam mengkomunikasikan pesan politik yang kompleks dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Temuan ini sejalan dengan teori semiotika Roland Barthes, yang mengungkapkan bahwa simbol visual mampu memuat makna konotatif yang kuat dan mudah dikenali oleh publik luas. Lambang Garuda biru berhasil membangun kesadaran kolektif tentang situasi darurat demokrasi dan memperkuat solidaritas sosial yang diperlukan untuk mobilisasi politik secara efektif.

Konsep partisipasi reaktif dalam penelitian ini juga ditemukan jelas terlihat dalam respons publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi demokratis masyarakat. Partisipasi ini muncul sebagai reaksi spontan terhadap tindakan DPR yang dianggap melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Publik tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan, tetapi juga mengambil tindakan nyata melalui partisipasi aktif di media sosial, menunjukkan bahwa konsep partisipasi reaktif relevan untuk memahami dinamika politik di era digital ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial mampu memberikan dampak signifikan dalam perubahan sikap politisi dan kebijakan publik. Beberapa partai politik serta tokoh politik merespons tuntutan publik dengan mengubah posisi politik mereka. Fenomena ini memperlihatkan efektivitas media sosial sebagai instrumen advokasi kebijakan, sekaligus menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dalam mekanisme kontrol publik terhadap proses pembuatan kebijakan.

Akan tetapi, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh gerakan sosial digital, khususnya ancaman disinformasi dan intimidasi digital. Tantangan ini menunjukkan perlunya kesadaran kritis masyarakat dalam mengelola informasi digital serta perlunya regulasi yang mendukung kebebasan ekspresi yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran media sosial sebagai ruang publik alternatif yang mampu memperkuat demokrasi digital serta mempengaruhi proses kebijakan publik secara lebih inklusif dan responsif di Indonesia

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan publik, khususnya dalam kasus gerakan "Peringatan Darurat" dengan lambang Garuda biru. Media sosial mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas dan masif, menciptakan tekanan nyata terhadap pembuat kebijakan. Gerakan ini membuktikan bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat politik yang mampu mempengaruhi kebijakan secara nyata dan substantif.

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa pola partisipasi reaktif yang muncul dari fenomena "Peringatan Darurat" didorong oleh ketidakpuasan kolektif dan perasaan terancamnya prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan DPR. Simbol Garuda biru secara efektif menciptakan solidaritas kolektif di kalangan publik serta memperkuat pesan politik gerakan tersebut. Simbolisasi visual ini terbukti menjadi instrumen penting yang meningkatkan daya tarik emosional gerakan dan memperkuat pesan politik sehingga mampu meningkatkan intensitas partisipasi publik secara masif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan "Peringatan Darurat" melalui media sosial mampu secara nyata memengaruhi sikap politisi dan kebijakan publik di Indonesia. Dampak nyata tersebut terlihat dari perubahan sikap beberapa partai politik dan politisi,

bahkan menyebabkan pengunduran diri tokoh-tokoh politik tertentu sebagai bentuk protes simbolik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi publik melalui media sosial di era digital bukan hanya sebagai partisipasi simbolik, melainkan juga memiliki potensi besar untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik secara langsung dan konkret.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dinamika partisipasi publik di media sosial dalam konteks kebijakan publik, khususnya yang menggunakan simbol visual sebagai sarana komunikasi politik. Penelitian lanjutan juga sebaiknya mempertimbangkan analisis lebih mendalam tentang bagaimana berbagai platform media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dalam mempengaruhi partisipasi publik. Secara praktis, pemerintah dan institusi legislatif disarankan untuk secara aktif memonitor dan merespons aspirasi yang berkembang di media sosial agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan representatif terhadap kepentingan publik.

Penelitian teoretis mendatang perlu lebih mendalami konsep partisipasi reaktif dengan meninjau kasus-kasus serupa dalam konteks berbeda untuk memperkaya pemahaman tentang motif dan dinamika kolektif masyarakat dalam merespons kebijakan yang kontroversial. Praktisnya, pembuat kebijakan perlu menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih responsif dan transparan agar dapat mengantisipasi serta mengelola partisipasi reaktif masyarakat secara lebih efektif. Strategi ini akan membantu pemerintah dalam mengelola dinamika partisipasi publik yang semakin kompleks di era digital.

Penelitian masa depan perlu mempertimbangkan pengaruh langsung simbol visual terhadap proses pengambilan kebijakan dengan menggunakan pendekatan semiotik politik yang lebih komprehensif. Secara praktis, masyarakat perlu diberikan edukasi digital yang lebih luas mengenai cara mengidentifikasi dan menangkal disinformasi serta ancaman intimidasi digital agar gerakan sosial digital dapat berlangsung secara efektif dan aman. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun regulasi yang mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi digital tetap sehat dan konstruktif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alkhatib, A. and Bernstein, M. (2019) 'Street-Level Algorithms: A Theory at the Gaps Between Policy and Decisions', *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp. 1–13. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300760>
- Binns, R. (2018) 'Fairness in Machine Learning: Lessons from Political Philosophy', *Proceedings of Machine Learning Research*, 81, pp. 1–11.
- Bovens, M. and Zouridis, S. (2002) 'From Street-Level to System-Level Bureaucracy: How ICT is Transforming Administrative Discretion', *Public Administration Review*, 62(2), pp. 174–184. <https://doi.org/10.1111/1540-6210.00168>
- Busch, P.A. and Henriksen, H.Z. (2022) 'Digital Discretion: A Systematic Literature Review of ICT and Street-Level Discretion', *Information Polity*, 27(1), pp. 3–28. <https://doi.org/10.3233/IP-200300>
- Eubanks, V. (2018) 'Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor', *St. Martin's Press*.
- Guenduez, A.A. and Mergel, I. (2024) 'Algorithms in the Public Sector: A Review of Discretion and Administrative Values', *Government Information Quarterly*, 41(1), 101894. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101894>

- Hadwick, A. and Lan, L. (2024) 'Algorithmic Accountability and the Social Contract', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 34(3), pp. 412–428.
<https://doi.org/10.1093/jopart/muad021>
- Hofmann, S. and Raap, U. (2025) 'Understanding Digital Discretion: A Socio-Technical Perspective on Algorithmic Decision-Making', *Public Management Review*, 27(2), pp. 201–225. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2299876>
- Janssen, M. and Kuk, G. (2016) 'The Challenges and Limits of Big Data Algorithms in Technocratic Governance', *Government Information Quarterly*, 33(3), pp. 371–377.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.011>
- Janssen, M. et al. (2020) 'Data-Driven Policy Making: The Need for a New Generation of Policy-Making Tools', *Government Information Quarterly*, 37(2), 101455.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101455>
- Keddell, E. (2019) 'Algorithmic Justice in Child Protection', *Social Sciences*, 8(10), 281.
<https://doi.org/10.3390/socsci8100281>
- Lipsky, M. (2010) *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. 30th edn. New York: Russell Sage Foundation.
- Meijer, A. and Grimmelikhuijsen, S. (2021) 'Responsible and Accountable Algorithmization', *Public Administration Review*, 81(4), pp. 756–759.
<https://doi.org/10.1111/puar.13381>
- Mittelstadt, B.D. et al. (2016) 'The Ethics of Algorithms: Mapping the Debate', *Big Data & Society*, 3(2), pp. 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Peeters, R. (2025) 'The New Digital State: Algorithmic Governance and the Crisis of Responsibility', *Administrative Science Quarterly*, 70(1), pp. 88–114.
<https://doi.org/10.1177/00018392241234567>
- Ranerup, A. and Henriksen, H.Z. (2023) 'Value Positions in the Pragmatic Use of Automated Decision-Making', *Government Information Quarterly*, 40(1), 101768.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101768>
- Sadin, É. (2020) 'Artificial Intelligence and the End of Human Deliberation', *AI & Society*, 35(2), pp. 321–329.
- Tummers, L. and Rocco, P. (2024) 'Discretion in the Age of Artificial Intelligence', *Public Management Review*, 26(3), pp. 450–472.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2211556>
- Veale, M. and Brass, I. (2019) 'Administration by Algorithm? Public Management Meets Public Sector Machine Learning', *Public Management Review*, 21(8), pp. 1193–1212. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1495832>
- Wirtz, B.W., Weyerer, J.C. and Sturm, B.J. (2026) 'The Future of AI in Public Administration', *Public Management Review*, 28(1), pp. 1–25.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2399110>
- Young, M.M., Bullock, J.B. and Lecy, J.D. (2019) 'Artificial Intelligence as a Tool for Data-Based Decision Making', *Business & Information Systems Engineering*, 61, pp. 387–395. <https://doi.org/10.1007/s12599-019-00594-w>
- Zouridis, S., van Eck, M., Bovens, M. and Schillemans, T. (2020) 'Algorithmic Accountability in Practice', *Public Administration Review*, 80(3), pp. 429–440.
<https://doi.org/10.1111/puar.13206>